



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SENIN, 21 SEPTEMBER 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



POLUSI: Pengusaha tahu di Tropodo-Krian sempat viral karena menggunakan bahan bakar plastik.

Pemkab Usulkan 500 Sambungan Jargas untuk Pengusaha Tahu Tropodo

KRIAN-Pemkab Sidoarjo mendorong penggunaan bahan bakar alternatif bagi pengusaha tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemasangan sekitar 500 sambungan jaringan gas bumi (jargas) di sentra industri tahu tersebut.

Usulan itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi sebagai upaya menyediakan bahan bakar yang dinilai lebih aman, ekonomis, dan ramah lingkungan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Subandi mengatakan, kebutuhan jargas menjadi perhatian karena sebagian besar warga di kawasan tersebut menggunakan mata pencaharian sebagai pengusaha tahu.

"Di Tropodo, Krian, ada satu desa yang merupakan sentra industri tahu. Kami sudah mengusulkan kurang lebih sekitar 500 sambungan jargas, karena satu kampung tersebut mayoritas adalah pengusaha tahu," kata Subandi, Minggu (20/9).

Menurut Subandi, pemasangan jargas diharapkan dapat mendorong perubahan pola penggunaan bahan bakar dalam proses produksi tahu. Hal itu berkaitan dengan persoalan pembakaran sampah plastik yang sebelumnya menjadi sorotan di sentra industri tahu Tropodo.

Praktik penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar produksi sempat mendapat perhatian luas, termasuk

● Ke Halaman 10

Bupati Minta 5 Alat Berat Segera Turun di Tanggulangin

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo H Subandi meminta lima alat berat segera dikerahkan untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah Tanggulangin dan Candi sebagai langkah antisipasi banjir saat musim hujan. Saat ini baru tiga unit ekskavator yang beroperasi mengeruk Sungai Gedangrowo di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin.

Subandi menyampaikan hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) normalisasi Sungai Gedangrowo, Kamis (17/9/2026). Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo segera menurunkan seluruh alat berat yang dibutuhkan.

"Sudah saya telepon dinas PU, kenapa alat-alatnya belum dikirim semua. Saya minta PU memastikan besok lima alat berat sudah turun semua," ujarnya Kamis (17/9/2026).

Subandi ingin memastikan seluruh sungai dan avfour di wilayah Kecamatan Candi dan Tanggulangin telah dinormalisasi sebelum memasuki musim hujan. Menurutnya, pengerahan alat berat harus dimaksimalkan dalam waktu dekat.

"Yang penting hari-hari ini normalisasi kita maksimal-



Bupati Sidoarjo H Subandi ketika meninjau langsung proses normalisasi sungai.

kan," tambahnya.

Menurutnya, sejumlah sungai mengalami pendangkalan, salah satunya sungai di Kalidawir, Tanggulangin. Karena itu, pengerahan alat berat difokuskan lebih dulu untuk normalisasi sungai dan avfour di wilayah Tanggulangin dan Candi.

"Normalisasi menjadi salah satu langkah antisipasi guna menghadapi ancaman banjir di kedua wilayah tersebut," tukasnya.

Selain pengerahan alat berat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan penanganan lain melalui program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK). Melalui program tersebut, Camat diminta berkolaborasi

dengan Dinas PU BM SDA Sidoarjo untuk memetakan lokasi dan kondisi sungai yang tidak dapat dijangkau alat berat.

Pemetaan tersebut juga mencakup langkah penanganan terhadap sungai yang sulit dijangkau alat berat. Dengan demikian, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh dari bagian hulu hingga hilir.

"Untuk normalisasi yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan alat-alat berat, minimal Pak Camat bisa berkolaborasi dengan PU. Kita petakan agar semua sungai di daerah Tanggulangin dan Candi betul-betul siap saat musim hujan," katanya. (jat/hs)



Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan Outing Day Learning (ODL) yang berpotensi membebani biaya wali murid (Foto: Diskominfo Sidoarjo)

Bupati Sidoarjo Minta Sekolah Tak Bebani Wali Murid

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan Outing Day Learning (ODL) yang berpotensi membebani biaya wali murid. Evaluasi terhadap pelaksanaan ODL di sekolah negeri maupun swasta pun diminta segera dilakukan.

Pemintaan itu disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima sejumlah keluhan wali murid terkait biaya ODL. Salah satu aduan menyebut kegiatan ODL siswa ke Yogyakarta membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 juta.

Subandi mengatakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurut dia, ODL seharusnya memberikan pengalaman belajar kepada siswa tanpa menambah tekanan pengeluaran bagi orang tua.

"Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi," ujar Subandi saat Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KIS) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis, 17 September 2026.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL di tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Evaluasi tersebut juga diminta ditindaklanjuti Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.

Subandi menilai kegiatan ODL tidak harus dilakukan ke luar daerah. Sekolah dapat memilih lokasi yang lebih dekat dengan tempat mempertahankan tujuan pembelajaran. "Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo," katanya. (rrc/ns)

Atasi Banjir, Pemkab Rencana Bangun Embung di Lahan 15 Hektare



SOLUSI: Bupati Sidoarjo Subandi saat mengecek normalisasi sungai di Tanggulangin.

Kedungbanteng Tanggulangin

TANGGULANGIN-Pemkab Sidoarjo menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin. Salah satu solusi yang disiapkan adalah pembangunan embung di lahan seluas sekitar 15 hektare.

Lahan yang berada di RT 08, Desa Kedungbanteng, tersebut diusulkan menjadi lokasi penampungan air. Embung diharapkan dapat menahan limpasan air sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir yang selama ini menghan-

tui kawasan tersebut.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, rencana pembangunan embung tersebut akan dimasukkan dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten yang disiapkan adalah proses pembebasan lahan.

"Kalau bisa pembebasan lahannya kita usahakan 2027. Kalau tidak bisa, 2028," kata Subandi, Kamis (17/9).

Menurutnya, setelah lahan berhasil dibebaskan, aset tersebut nantinya dapat diserahkan kepada pemerintah desa untuk dikelola. Tidak menutup kemungkinan, kawasan embung tersebut juga dikembangkan menjadi lokasi wisata.

● Ke Halaman 10

Pemkab Talangi Pengobatan Korban MBG

Bila BGN Tak Segera Tanggung Biaya

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menyiapkan dana talangan untuk biaya pengobatan korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ter-

sebut dilakukan jika Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menanggung biaya pengobatan para korban.

Plh Sekda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan, seluruh data korban sudah disampaikan kepada BGN. Pemkab kini masih menunggu tindak lanjut ter-

kait pengajuan biaya pengobatan tersebut. "Data sudah kita kirim dan tinggal menunggu," kata Ainur yang juga menjabat Kepala Satgas MBG Sidoarjo kemarin (20/9).

Ainur belum dapat menyebutkan nilai biaya yang diajukan kepada BGN. Namun, pengajuan untuk biaya peng-

obatan 726 korban tersebut sudah disampaikan dan tinggal menunggu proses dari BGN.

Meski begitu, Pemkab tidak ingin biaya pengobatan korban terkatung-katung. Karena itu, skema penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan sebagai langkah antisipasi. (ful/hen)



Kalau nanti dari BGN tidak menanggung, kita sudah siap bertanggung jawab dengan dana BTT,"

Muhammad Ainur Rahman
Plh Sekda Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓Pembkab Talangi Pengobatan Korban MBG

Bila BGN Tak Segera Tanggung Biaya

SIDOARJO – Pembkab Sidoarjo menyiapkan dana talangan untuk biaya pengobatan korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ter

sebut dilakukan jika Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menanggung biaya pengobatan para korban.

Plh Sekda Sidoarjo Muhammad Ainur Rahman mengatakan, seluruh data korban sudah disampaikan kepada BGN. Pembkab kini masih menunggu tindakan ut

kait pengajuan biaya pengobatan tersebut. "Data sudah kita kirim dan tinggal menunggu," kata Ainur yang juga menjabat Kepala Satgas MBG Sidoarjo kemarin (20/9).

Ainur belum dapat menyebutkan nilai biaya yang diajukan kepada BGN. Namun, pengajuan untuk biaya peng

obatan 726 korban tersebut sudah disampaikan dan tinggal menunggu proses dari BGN.

Meski begitu, pembkab tidak ingin biaya pengobatan korban terkatung-katung. Karena itu, skema penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan sebagai langkah antisipasi. **(ful/hen)**



Kalau nanti dari BGN tidak menanggung, kita sudah siap bertanggung jawab dengan dana BTT,"

Muhammad Ainur Rahman
Plh Sekda Sidoarjo

Jawa Pos



PRODUK UMKM: Wabup Mimik (tengah) membeli produk makanan yang dihasilkan pelaku usaha di Desa Durungbedug.

Wabup Mimik Buka CFD Durungbedug

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana membuka Car Free Day (CFD) perdana di Desa Durungbedug, Kecamatan Candi Minggu. CFD yang digelar di jalan desa itu diikuti 360 pelaku UMKM dan ribuan warga.

Mimik mengatakan, CFD Durungbedug bisa dimanfaatkan sebagai tempat aktivitas warga saat akhir pekan. Apalagi, adanya ratusan UMKM akan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar. "Dengan adanya CFD ini, UMKM kita bisa ikut bergerak, masyarakat datang, kemudian produk-produk lokal juga bisa dikenalkan dan dibeli langsung," katanya, kemarin (20/9).

Menurutnya, untuk menikmati akhir pekan tidak selalu harus pergi ke pusat kota. Kegiatan seperti CFD bisa ditarik ke desa dengan melibatkan warga dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, potensi lokal yang ada di desa bisa ikut bergerak dan dikenal lebih luas.

Dia menyebut, CFD tingkat desa seperti yang digelar di Durungbedug masih jarang ditemui di Kota Delta. Karena itu, kegiatan tersebut bisa menjadi contoh bagi desa lain untuk membuat kegiatan serupa dengan menyesuaikan potensi masing-masing. "Sepertinya belum ada di Sidoarjo, ini CFD di desa pertama kali," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Durungbedug M Iskak menjelaskan, kegiatan tersebut berawal dari keinginan warga yang ingin adanya kegiatan yang bisa dinikmati saat akhir pekan. Selama ini, kegiatan yang melibatkan banyak warga hanya saat momen-momen tertentu saja. Seperti peringatan hari besar agama maupun nasional saja.

"Kami ingin kegiatan seperti ini bisa menjadi ruang warga untuk berkumpul sekaligus mengenalkan apa yang ada di desa," terangnya. Karena itu pihaknya menyiapkan produk pertanian untuk ditampilkan dalam kegiatan CFD. "Kami siapkan produk unggulan desa kami, yakni sayuran dan padi," imbuhnya.

Iskak memastikan, CFD akan dilanjutkan sebagai agenda mingguan di Desa Durungbedug. Pelaksanaan berikutnya akan dibuat lebih meriah dengan melibatkan lebih banyak warga. (ful/hen)

Jawa Pos

Dispendikbud Minta Wali Murid Laporkan Sekolah yang Beban Biaya ODL

SIDOARJO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo meminta wali murid melapor jika menemukan sekolah yang menggelar Outing Day Learning (ODL) dengan biaya tinggi dan memberatkan. Ada sanksi untuk kepala sekolah yang tidak mematuhi imbauan.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Subandi sudah mengingatkan sekolah agar tidak menggelar ODL yang membebani orang tua siswa. Kepala sekolah yang tidak mematuhi imbauan tersebut disebut bakal mendapat sanksi. Hukumannya bisa mutasi.

Terkait hal itu, Kepala Dikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo mengatakan, sekolah seharusnya mempertimbangkan kemampuan wali murid sebelum menentukan lokasi dan konsep kegiatan ODL.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

EDUKASI: Siswa mengikuti kegiatan ODL di Museum Mpu Tantular. Sekolah diimbau menggelar kegiatan di dalam kota.

Kegiatan belajar di luar kelas tidak harus dilakukan dengan perjalanan ke luar kota.

Manfaatkan Potensi Lokal

Ridho mendorong sekolah memanfaatkan berbagai potensi lokal di Sidoarjo sebagai lokasi kegiatan. "Banyak pilihan tempat yang bisa digunakan

untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan besar," kata Ridho.

Menurut Ridho, imbauan tersebut disampaikan menjelang libur pertengahan semester. Ridho mewanti-wanti kepala sekolah agar tidak menjadikan perjalanan jauh sebagai ukuran keberhasilan ODL. (ful/hen)

Jawa Pos



POLUSI: Pengusaha tahu di Tropodo Krian sempat viral karena menggunakan bahan bakar plastik.

Pemkab Usulkan 500 Sambungan Jargas untuk Pengusaha Tahu Tropodo

KRIAN-Pemkab Sidoarjo mendorong penggunaan bahan bakar alternatif bagi pengusaha tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemasangan sekitar 500 sambungan jaringan gas bumi (jargas) di sentra industri tahu tersebut.

Usulan itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi sebagai upaya menyediakan bahan bakar yang dinilai lebih aman, ekonomis, dan ramah lingkungan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Subandi mengatakan, kebutuhan jargas menjadi perhatian karena sebagian besar warga di kawasan tersebut menggantungkan mata pencaharian sebagai pengusaha tahu.

"Di Tropodo, Krian, ada satu desa yang merupakan sentra industri tahu. Kami sudah mengusulkan kurang lebih sekitar 500 sambungan jargas, karena satu kampung tersebut mayoritas adalah pengusaha tahu," kata Subandi, Minggu (20/9).

Menurut Subandi, pemasangan jargas diharapkan dapat mendorong perubahan pola penggunaan bahan bakar dalam proses produksi tahu. Hal itu berkaitan dengan persoalan pembakaran sampah plastik yang sebelumnya menjadi sorotan di sentra industri tahu Tropodo.

Praktik penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar produksi sempat mendapat perhatian luas, termasuk

● Ke Halaman 10

Fraksi PDIP: Data Bansos Tak Sesuai Kondisi Warga

DATA penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Fraksi



Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Prabata Ferdiansyah

PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo menilai masih terdapat kesenjangan antara data desil yang tercatat dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.

Persoalan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI

Perjuangan DPRD Sidoarjo Prabata Ferdiansyah dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo. Fraksi PDIP meminta Pemkab Sidoarjo tidak hanya mengandalkan data dalam sistem, tetapi aktif melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat.

Prabata mengatakan, keresahan masyarakat muncul karena adanya perbedaan status desil dengan kondisi ekonomi riil warga. Kondisi itu berpotensi membuat penyaluran bansos tidak sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.

"Fraksi kami sangat memahami keresahan masyarakat terkait adanya perbedaan antara status desil yang tercatat pada sistem dengan



Dipindai dengan CamScanner

Ke Halaman 10

Fraksi PDIP...

kondisi ekonomi riil yang ada di lapangan,” ujarnya.

Fraksi PDIP memahami bahwa pemutakhiran data desil berada di tingkat pusat, yakni Kementerian Sosial dan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sedangkan pemerintah daerah memiliki peran sebagai verifikator sekaligus pengusul pembaruan data.

Karena itu, Pemkab Sidoarjo didorong mengambil langkah konkret dengan membuka posko pengaduan di setiap desa dan kelurahan. Posko tersebut diharapkan menjadi tempat masyarakat melaporkan apabila data kondisi ekonominya tidak sesuai dengan status yang tercatat.

Tak hanya menunggu laporan, Fraksi PDIP juga meminta Pemkab Sidoarjo menurunkan tim survei ke lapangan. Verifikasi secara langsung dinilai penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Fraksi kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat membuka posko pengaduan di tiap-tiap desa atau kelurahan dan menurunkan tim survei secara langsung untuk mencocokkan data dengan realita,” tegas Prabata.

Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara transparan agar persoalan ketidaksesuaian data tidak terus berulang. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bansos diharapkan dapat kembali tepat sasaran.

Sorotan terhadap data bansos

Atasi Banjir, Pemkab Rencana Bangun Embung di Lahan 15 Hektare



SOLUSI: Bupati Sidoarjo Subandi saat mengecek normalisasi sungai di Tanggulangin.

■ Kedungbanteng Tanggulangin

TANGGULANGIN—Pemkab Sidoarjo menyiapkan langkah baru untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin. Salah satu solusi yang disiapkan adalah pembangunan embung di lahan seluas sekitar 15 hektare.

Lahan yang berada di RT 08, Desa Kedungbanteng, tersebut diusulkan menjadi lokasi penampungan air. Embung diharapkan dapat menahan limpasan air sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir yang selama ini menghan-

tui kawasan tersebut.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, rencana pembangunan embung tersebut akan dimasukkan dalam perencanaan Pemkab Sidoarjo. Tahap awal yang disiapkan adalah proses pembebasan lahan.

“Kalau bisa pembebasan lahannya kita usahakan 2027. Kalau tidak bisa, 2028,” kata Subandi, Kamis (17/9).

Menurutnya, setelah lahan berhasil dibebaskan, aset tersebut nantinya dapat diserahkan kepada pemerintah desa untuk dikelola. Tidak menutup kemungkinan, kawasan embung tersebut juga dikembangkan menjadi lokasi wisata.

● Ke Halaman 10



Atasi Banjir,...

“Setelah itu tanahnya bisa diserahkan kepada desa untuk dikelola. Termasuk kemungkinan menjadi kawasan wisata,” ujarnya.

Selain persoalan banjir, Pemkab Sidoarjo juga memberi perhatian terhadap fenomena penurunan tanah di Kedungbanteng. Kondisi tersebut

dinilai perlu dikaji secara lebih terukur agar penanganannya dapat dilakukan berdasarkan data.

Dengan rencana pembangunan embung, Pemkab Sidoarjo berharap persoalan lingkungan di Kedungbanteng dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan normalisasi sungai, tetapi juga menyiapkan ruang tampungan air. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Biaya Pembelajaran Luar Sekolah Beban Wali Murid

■ Bupati Minta Evaluasi

KOTA-Keluhan wali murid soal mahal biaya pembelajaran luar sekolah atau Outdoor Learning (ODL) membuat Bupati Sidoarjo Subandi turun tangan. Ia meminta seluruh sekolah tingkat SD dan SMP mengevaluasi pelaksanaan ODL agar kegiatan pembelajaran di luar kelas tidak justru membebani ekonomi orang tua siswa.

Subandi menginstruksi-

kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan ODL. Sekolah diminta tidak memaksakan kegiatan dengan tujuan jauh yang membutuhkan biaya hingga jutaan rupiah.

Menurutnya, ODL tidak harus dilakukan ke luar kota. Sekolah dapat memanfaatkan berbagai destinasi lokal di Sidoarjo sebagai lokasi pembelajaran sekaligus rekreasi edukatif.

"Sudah kalau ODL ini



Sudah kalau ODL ini mengganggu kepada bapak ibu wali murid, lebih baik ODL enggak usah jauh-jauh. ODL di Alun-alun Sidoarjo, jalan-jalan,"

Subandi
Bupati Sidoarjo

mengganggu kepada bapak ibu wali murid, lebih baik ODL enggak usah jauh-jauh. ODL di Alun-alun Sidoarjo, jalan-jalan," kata Subandi, Kamis (17/9).

Ia mencontohkan adanya laporan biaya ODL siswa SMP ke Malang yang mencapai sekitar Rp 1 juta untuk kegiatan selama dua hari. Bahkan, perjalanan ke Yogyakarta disebut dapat menarik biaya hingga Rp 1,2 juta per siswa.

"Daripada nanti narik ke Jogja Rp 1.200.000, laporan kepada Bupati acara di Malang

ODL anak SMP dikenakan Rp 1.000.000 lebih dua hari, ini ndak boleh," tegasnya.

Subandi menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan sekolah dalam menyusun agenda ODL. Kegiatan pembelajaran, kata dia, harus memberikan manfaat bagi siswa tanpa menambah beban finansial wali murid.

Karena itu, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo menindaklanjuti instruksi tersebut.

● Ke Halaman 10



✓ Biaya Pembelajaran Luar...

Dispendikbud juga diminta memastikan kepala sekolah tidak memaksakan agenda ODL yang berpotensi menimbulkan keberatan dari orang tua. "Saya minta tolong mulai dari kepala

sekolah-sekolah, ini tanggungjawabnya Dinas Pendidikan. Kalau kepala sekolah dan SD SMP yang tidak mengikuti perintah Bupati, sudah saya ngak mau dengan ekonomi seperti ini," ujarnya. Selain lokasi kegiatan, Subandi juga menyoroti penggunaan jasa transpor-

tasi untuk ODL. Ia meminta sekolah tidak melakukan intervensi atau menunjuk penyedia bus tertentu.

Sekolah, lanjut dia, dipersilakan menggunakan bus milik masyarakat Sidoarjo selama kendaraan tersebut dalam kondisi baik, aman, dan layak

digunakan.

"Kalau ada ODL enggak usah pakai bus-bus, pakai bus Sidoarjo. Jangan itu-itu saja, Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau bus-nya bagus," katanya.

Subandi menegaskan tidak boleh

ada intervensi dalam pemilihan transportasi maupun penyedia jasa lainnya dalam pelaksanaan ODL. Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha transportasi lokal. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KERJA KERAS: Pekerja menyelesaikan penggantian bantalan beton di jalur kereta api di Porong, Sidoarjo.

KAI Ganti 6.329 Bantalan Beton di Jalur Tanggulangin-Porong-Bangil

PORONG-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya melakukan perawatan jalur kereta api di petak Tanggulangin-Porong-Bangil. Perawatan tersebut dilakukan melalui penggantian ribuan bantalan beton dan pekerjaan angkat listring untuk memastikan jalur tetap aman serta andal dilintasi kereta api.

Pekerjaan berlangsung di Km 33+100 hingga Km 37+100 dengan total 6.329 bantalan beton yang dipasang. Penggantian bantalan merupakan bagian dari perawatan preventif untuk menjaga kekuatan konstruksi jalur, sementara angkat listring dilakukan untuk memperbaiki geometri jalur, termasuk kelurusan, elevasi, dan keseimbangan rel.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan perawatan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api.

"Perawatan jalur merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Melalui penggantian bantalan beton dan pekerjaan angkat listring, kami memastikan

FENOMENA

Ke Halaman 10



KAI Ganti 6.329 Bantalan...

kondisi geometri jalur tetap terjaga sehingga dapat mendukung perjalanan kereta api yang aman, lancar, dan andal," ujar Mahendro.

Menurut dia, pemeliharaan jalur

tidak hanya dilakukan ketika terjadi gangguan. KAI juga menerapkan perawatan preventif untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas prasarana, terutama pada jalur dengan intensitas perjalanan kereta api yang tinggi.

KAI Daop 8 Surabaya memastikan

seluruh pekerjaan perawatan dilakukan melalui perencanaan dan pengawasan untuk menjaga kondisi prasarana tetap sesuai standar teknis yang berlaku.

Fraksi PDIP...

"Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap operasional KAI. Oleh karena itu, perawatan dan peningkatan kualitas jalur dilakukan secara konsisten, tidak hanya

Tak hanya menunggu laporan,

ketika ditemukan gangguan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk memastikan prasarana selalu dalam kondisi optimal," pungkaskan Mahendro. (sur/vga)

tersebut disampaikan dalam pan-



Antisipasi Banjir di Sidoarjo

Bupati Minta 5 Alat Berat Segera Turun di Tanggulangin

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

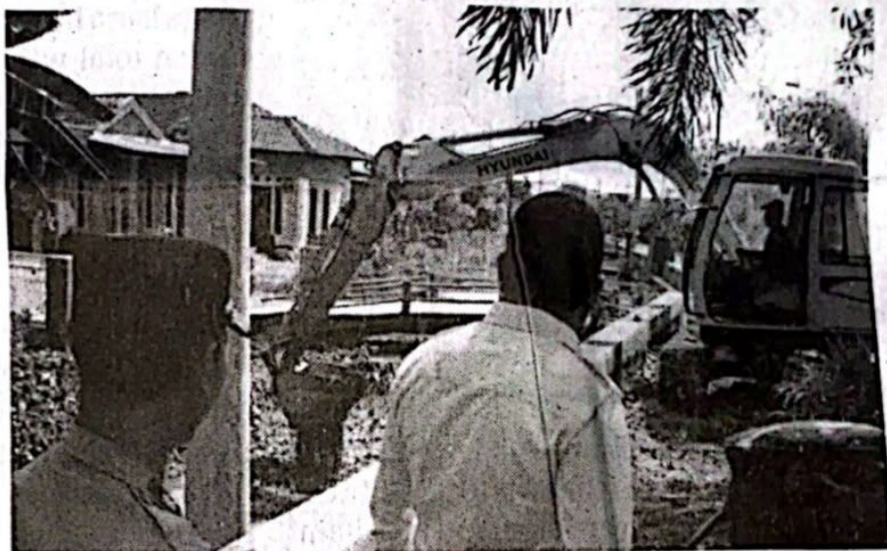
Bupati Sidoarjo H Subandi meminta lima alat berat segera dikerahkan untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah Tanggulangin dan Candi sebagai langkah antisipasi banjir saat musim hujan. Saat ini baru tiga unit ekskavator yang beroperasi mengeruk Sungai Gedangrowo di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin.

Subandi menyampaikan hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) normalisasi Sungai Gedangrowo, Kamis (17/9/2026). Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo segera menurunkan seluruh alat berat yang dibutuhkan.

"Sudah saya telepon dinas PU, kenapa alat-alatnya belum dikirim semua. Saya minta PU memastikan besok lima alat berat sudah turun semua," ujarnya Kamis (17/9/2026).

Subandi ingin memastikan seluruh sungai dan avfour di wilayah Kecamatan Candi dan Tanggulangin telah dinormalisasi sebelum memasuki musim hujan. Menurutnya, pengerahan alat berat harus dimaksimalkan dalam waktu dekat.

"Yang penting hari-hari ini normalisasi kita maksimal-



Bupati Sidoarjo H Subandi ketika meninjau langsung proses normalisasi sungai.

kan," tambahnya.

Menurutnya, sejumlah sungai mengalami pendangkalan, salah satunya sungai di Kalidawir, Tanggulangin. Karena itu, pengerahan alat berat difokuskan lebih dulu untuk normalisasi sungai dan avfour di wilayah Tanggulangin dan Candi.

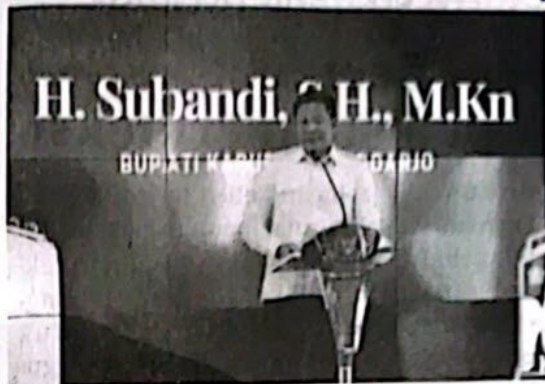
"Normalisasi, menjadisalah satu langkah antisipasi guna menghadapi ancaman banjir di kedua wilayah tersebut," tukasnya.

Selain pengerahan alat berat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan penanganan lain melalui program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK). Melalui program tersebut, camat diminta berkolaborasi

dengan Dinas PU BM SDA Sidoarjo untuk memetakan lokasi dan kondisi sungai yang tidak dapat dijangkau alat berat.

Pemetaan tersebut juga mencakup langkah penanganan terhadap sungai yang sulit dijangkau alat berat. Dengan demikian, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh dari bagian hulu hingga hilir.

"Untuk normalisasi yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan alat-alat berat, minimal Pak Camat bisa berkolaborasi dengan PU. Kita petakan agar semua sungai di daerah Tanggulangin dan Candi betul-betul siap saat musim hujan," katanya. (jat/ns)



Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan ODL yang berpotensi membebani biaya wali murid
(Foto: Diskominfo Sidoarjo)

Bupati Sidoarjo Minta Sekolah Tak Bebani Wali Murid

Sidoarjo–HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan Outing Day Learning (ODL) yang berpotensi membebani biaya wali murid. Evaluasi terhadap pelaksanaan ODL di sekolah negeri maupun swasta pun diminta segera dilakukan.

Permintaan itu disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima sejumlah keluhan wali murid terkait biaya ODL. Salah satu aduan menyebut kegiatan ODL siswa ke Yogyakarta membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 juta.

Subandi mengatakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurut dia, ODL seharusnya memberikan pengalaman belajar kepada siswa tanpa menambah tekanan pengeluaran bagi orang tua.

"Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi," ujar Subandi saat Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis, 17 September 2026.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL di tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Evaluasi tersebut juga diminta ditindaklanjuti Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.

Subandi menilai kegiatan ODL tidak harus dilakukan ke luar daerah. Sekolah dapat memilih lokasi yang lebih dekat dengan tetap mempertahankan tujuan pembelajaran. "Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo," katanya. (rrc/ns)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komitmen Kemanusiaan di Usia 81, PMI Tekankan Pelayanan Higienis dan Profesional

Sidoarjo, Bhirawa

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sidoarjo memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 dengan merefleksikan kembali khitah perjuangan kemanusiaan. Mengusung semangat pengabdian tanpa batas, PMI Sidoarjo berkomitmen penuh untuk terus memegang teguh amanah menjadi lembaga yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Peringatan HUT ke-81 yang digelar secara khidmat dan sederhana tersebut berlangsung di Kantor Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Sidoarjo, Jalan Jati No. 1, Sidoarjo, pada Kamis (17/9) kemarin.

Agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua PMI Sidoarjo, Andjar Surjadianto, jajaran pengurus dan pegawai PMI Sidoarjo, perwakilan pendonor darah, serta mitra strategis seperti Laznas Nurul Hayat Sidoarjo dan Polrestabes Sidoarjo. Kegiatan ini juga diramaikan oleh kehadiran masyarakat Sidoarjo yang sedang melakukan donor darah berkala.

Dalam sambutannya, Ketua PMI Sidoarjo Andjar Surjadianto mengajak seluruh jajaran untuk bersyukur sekaligus merefleksikan transformasi peran PMI dari masa ke masa. Jika pada zaman kemerdekaan PMI bertaruh nyawa merawat korban perang melawan penjajah, tantangan hari ini telah bergeser pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan modern, seperti penanggulangan bencana alam dan jaminan ketersediaan darah di rumah sakit. "Kemanusiaan harus selalu dipegang utama dan dijalankan. Kami memohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar amanah dalam menjalankan tugas ini bisa terus memberikan manfaat yang luas," ujar Andjar.[kus.ca]

HARIAN
Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Campak merupakan penyakit yang mudah menular, terutama pada k yang belum memiliki ebalat tubuh optimal."

Lakhsmie Herawati Yuwantina
Kepala Dinkes Sidoarjo

Suspek Campak Melonjak 48 Persen, Terbanyak di Buduran

SIDOARJO – Kasus suspek campak di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat. Selama Januari-Agustus 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo mencatat sebanyak 289 kasus suspek campak. Angka tersebut naik 54 kasusnya dari selisih 4521 person di kabupaten ghan pericu yang sama tahun sebelumnya sebanyak 195 kasus.

Kepala Dinkes Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, dari total 289 suspek, sebanyak 40 kasus dinyatakan positif campak. Kecamatan Buduran tercatat sebagai wilayah dengan jumlah suspek tertinggi yakni mencapai 25 kasus.

"Campak merupakan penyakit yang mudah menular, terutama pada anak yang belum memiliki kekebalan tubuh optimal," kata Lakhsmie. Dia mengatakan, dari 40 kasus positif campak yang ditemukan, sebanyak 37 pasien sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, mereka sudah dinyatakan sembuh.

Survei Cakupan Imunisasi Komunitas
Untuk menekan risiko penularan, Dinkes Sidoarjo telah melakukan Survei Cakupan Imunisasi Komunitas (SCIK). Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat cakupan imunisasi di masyarakat sekaligus memetakan sasaran yang belum mendapatkan imunisasi campak. "Survei ini untuk melihat cakupan imunisasi, termasuk sasaran yang belum mendapatkan imunisasi campak," ujarnya.

Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Dinkes juga mendorong pelaksanaan imunisasi kejar bagi sasaran yang belum mendapatkan imunisasi sesuai ketentuan. Dengan cakupan imunisasi yang lebih baik, risiko anak tertular maupun menularkan campak dapat ditekan. **(ful/hen)**

Jawa Pos

Lebar Hanya 4 Meter, Warga Tolak Jalan Surowongso Naik Kelas

Ancam
Keselamatan,
Berpotensi
Ganggu Aktivitas

SIDOARJO - Rencana kenaikan status Jalan Surowongso, Desa Karangbong, Gedangan, dari jalan kelas III menjadi kelas I menuai penolakan. Lebar jalan yang hanya empat meter dinilai belum sebanding dengan beban kendaraan melintas, terutama truk-truk besar dari kawasan industri.

Sekretaris Desa (Sekdes) Karangbong Heri Susanto membenarkan adanya penolakan dari masyarakat. Dia turut mempertanyakan

dasar kebijakan tersebut. "Jalan sempit belum sesuai kapasitas kendaraan yang melintas," kata Heri.

Jika statusnya naik, maka jumlah kendaraan besar yang melintas bakal bertambah. Hal itu tidak hanya mengancam keselamatan pengendara. Namun, juga aktivitas warga di sekitar jalan raya.

Menurut Heri, kenaikan status jalan menjadi kelas I seharusnya tidak hanya mempertimbangkan fungsi jalan sebagai akses kendaraan industri. Aktivitas masyarakat sekitar juga harus menjadi pertimbangan. Heri mencontohkan persoalan perizinan apabila warga hendak menggunakan sebagian badan jalan untuk

JALAN SUROWONGSO DI KARANGBONG

Awalnya berstatus jalan desa

Lebarnya 4 meter

Dilewati kendaraan pabrik

Jalan dinaikkan dari kelas III ke kelas I

Sumber: Pengamatan Jawa Pos

kegiatan masyarakat. Dengan status kelas I, kewenangan dan mekanisme perizinan akan berbeda.

Heri juga menegaskan, warga berpotensi melakukan penolakan apabila kepentingan mereka tidak diakomodasi. Bahkan, dia mengingatkan kemungkinan terjadinya pemblokiran jalan jika persoalan tidak mendapatkan solusi.



BIKIN MACET: Truk melintasi Jalan Surowongso yang statusnya akan dinaikkan menjadi kelas I.

Kondisi Belum Ideal
Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo mengakui kondisi Jalan Karangbong belum ideal untuk memenuhi karakteristik jalan kelas I. Kabid Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Khoirul Anam mengatakan, persoalan muncul karena ruas jalan relatif kecil harus melayani kendaraan berukuran besar.

"Memang di situ daerah industri. Ada aduan jalannya

kecil, tapi yang lewat kendaraannya besar," katanya. Meski begitu, penetapan kenaikan kelas jalan dilakukan secara bertahap. Kondisi fisik jalan yang belum memenuhi persyaratan tidak serta-merta menggurkan penetapan. Pemenuhan persyaratan dapat dilakukan dalam jangka waktu hingga 10 tahun sejak penetapan kelas jalan oleh gubernur. (ful/hen)

Jawa Pos



KAI DAOP 8 SURABAYA

PERAWATAN RUTIN: Pekerja memulai proses penggantian bantalan rel di Tanggulangin kemarin (17/9).

KAI Ganti 6.329 Bantalan Rel di Jalur Sidoarjo-Pasuruan

SIDOARJO - Jalur kereta api (KA) Tanggulangin-Porong-Bangil mendapat perawatan besar. PT KAI Daop 8 Surabaya mengganti sebanyak 6.329 bantalan beton rel sekaligus melakukan peninggian elevasi jalur. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjaga keselamatan dan kestabilan perjalanan KA dalam jangka panjang.

Penggantian bantalan membentang dari Km 33+100 di Ketapang, Tanggulangin, hingga Km 37+100 yang masuk wila-

yah Bangil, Pasuruan. Pekerjaan telah dimulai sejak pekan lalu dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, perawatan tersebut dilakukan karena terdapat bagian jalur, khususnya yang melintasi kawasan Porong, mengalami penurunan elevasi. "Perawatan ini merupakan bagian preventif untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api," katanya kemarin (17/9). (eza/hen)

Jawa Pos